
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY-JK TENTANG KENAIKAN HARGA BBM 1 OKTOBER 2005

Muhammad Hairul Saleh¹

Abstract

The article describes the SBY-JK public policy in raising fuel price, which later affects the lives of any sections of the communities. In socio-economic field, such a policy skyrocketed the price of most commodities, and this, by all means, suffered the majority of the Indonesian people. As well, many more people are becoming more difficult to get proper education owing to higher costs in education or less income in financing it. Accordingly, frequent demonstrations were staged to demand the cancellation of the fuel price policy. In politics, the SBY-JK government popularity decreased since the implementation of the fuel price policy on October 1, 2005.

The introduction cash distribution scheme (Bantuan Langsung Tunai, BLT) to the poor aiming at compensating any impacts of a soaring fuel price has not been able to solve the problems. In fact, the compensation scheme created new problems due to mistarget in cash distribution. In many cases, those who were not eligible to get the BTL received the compensation, while those who truly deserved for such cash compensation did not receive the BLT. It is partly caused by inaccuracy in the registration of poor citizens by the BPS. Besides, there are apparatus in the village and district levels that used the money (BLT) to line their own pockets.

Keywords : *policy, government, fuel price, social effect, economic effect, political effect, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Tanggal 1 Oktober 2005 yang lalu, pemerintah dengan “sangat terpaksa” mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan ini adalah yang kedua setelah Maret 2005 pemerintah dibawah kepemimpinan SBY-JK juga melakukan hal yang sama. Harga premium naik dari Rp. 2.400 menjadi Rp. 4.500 per liter, solar dari Rp. 2.300 menjadi Rp.4.300, dan minyak tanah dari Rp. 700 menjadi Rp. 2.000, suatu nilai kenaikan yang sangat *fantastis* untuk ukuran keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini. Bahkan akibat dari kenaikan harga BBM,

¹ Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Mulawarman.

diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah karena warga yang sebelumnya menyandang status miskin bisa menjadi sangat miskin karena tidak mampu lagi mengimbangi kenaikan harga di pasaran. Jika tidak ada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, maka diperkirakan akan ada peningkatan jumlah penduduk miskin dari sekitar 40 juta orang menjadi 60 juta orang.

Belum hilang ingatan kita atas dampak sosial ekonomi akibat kenaikan harga BBM Maret 2005 yang lalu, lagi-lagi pemerintah membuat suatu hentakan yang *dahsyat* dengan sebuah Kebijakan yang tidak populis. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harga BBM rata-rata 125 persen, padahal sebelumnya pemerintah telah menjanjikan bahwa kenaikan harga BBM maksimal pada kisaran 50 persen. Tapi kenyataannya tidak demikian, rakyat kembali harus menelan pil yang sangat pahit buah dari retorika politik pemerintah.

Menurut pemerintah, Kebijakan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi karena harga minyak di pasar internasional melonjak tajam hingga mencapai level \$70 per barrel, ditambah lagi menurunnya produksi minyak nasional yang menyebabkan meningkatnya impor minyak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kondisi ini mengakibatkan tingginya angka subsidi BBM yang mencapai 113,7 trilyun rupiah dengan defisit 1,7 persen. Oleh karena itu pemerintah akan mengurangi beban keuangan negara dengan mencabut subsidi BBM secara bertahap, mengingat mayoritas subsidi dinikmati oleh kalangan yang mampu (pemilik kendaraan bermotor).

Hal lain yang menyebabkan beban keuangan negara semakin berat karena masalah hutang luar negeri. Masalah ini menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap lembaga-lembaga donor internasional. Padahal akibat dari ketergantungan ini membawa implikasi yang sangat luas bagi sendi kehidupan sosial ekonomi bangsa. Kita cenderung akan lebih memenangkan kepentingan pihak asing ketika dalam beberapa kasus hal itu bertentangan dengan kepentingan rakyat sendiri. Kasus pencabutan subsidi BBM adalah contoh konkrit dampak hutang luar negeri. Inilah realitas kehidupan yang sedang dialami oleh bangsa ini.

Kebijakan pencabutan subsidi BBM menjadi sebuah dilema yang sangat berat bagi pemerintah. Di satu sisi ketika pemerintah mengakomodasi keinginan rakyat banyak agar subsidi tetap dijalankan, maka dikuatirkan tidak akan mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga keuangan internasional (lembaga donor) karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat ketergantungan Indonesia pada lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut masih sangat besar.

Sebaliknya, ketika pemerintah lebih mengakomodasi tuntutan lembaga-lembaga keuangan internasional, maka gejolak sosial di masyarakat akan semakin tak terhindarkan, hingga akhirnya pemerintah berada di dua persimpangan antara masyarakat atau lembaga-lembaga keuangan internasional. Keadaan ini menuntut

adanya sikap dan semangat “kepublikan” dari para penentu Kebijakan, yakni sejauhmana mereka mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan sekelompok kecil orang. Pemerintah harus memilih dengan konsekuensi mempertaruhkan nasib bangsa untuk mendapatkan kepercayaan dari lembaga-lembaga donor internasional atau tetap berpegang teguh pada sikap untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Menurut menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil, pemerintah sadar betul bahwa Kebijakan menaikkan harga BBM adalah pilihan yang buruk, orang susah bisa bertambah susah. Namun kesusahan dan pengorbanan itu bersifat sementara untuk kebaikan masa depan (*short term pain for long term again*). Seandainya ada Kebijakan yang lebih masuk akal dan dapat diimplementasikan, pemerintah tentu akan menempuh Kebijakan itu sebagai prioritas (*Kompas*, 22 Oktober 2005).

Apa yang dikemukakan oleh Menkominfo tersebut adalah merupakan retorika politik pemerintah untuk menenangkan kondisi masyarakat yang sedang bergejolak sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Masyarakat diharapkan agar lebih arif menanggapi kebijakan yang sulit ini karena kedepan justru kesejahteraan rakyatlah yang menjadi tujuan akhir dari semuanya. Namun di mata sebagian besar publik, kebijakan ini sebenarnya telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program khusus yang diperuntukkan kepada rakyat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM, yaitu Program pemberian *Dana Kompensasi BBM* dalam bentuk *Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. Secara riil tiap keluarga akan mendapatkan 100 ribu rupiah per bulan yang akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali dalam jangka waktu setahun. Proses distribusi tahap I dimulai tanggal 1 Oktober 2005 bersamaan dengan pengumuman kenaikan harga BBM. Tiap keluarga akan menerima 300 ribu rupiah. Namun tanda tanya besar yang muncul kemudian, “*apakah betul kebijakan pemberian dana kompensasi BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini akan mampu mengurangi beban rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya atau malah akan menambah kesengsaraan rakyat yang memang sudah sengsara?*”

Adalah DPR (legislatif) yang diisi oleh politisi-politisi senayan dan nota bene adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia dengan fungsi sebagai lembaga pengontrol malah dengan suara mayoritas telah merestui kebijakan tersebut dan seakan tidak merasakan penderitaan apa yang akan dialami oleh rakyat miskin akibat kenaikan harga BBM. Padahal mereka bisa melenggang dan mendapatkan “*kursi*” di Senayan yang diperebutkan lewat Pemilu Legislatif 2004 yang lalu atas kepercayaan rakyat.

Keputusan DPR menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 diambil melalui Rapat Paripurna Selasa malam 27 September 2005 sebagai konsekuensi logis disahkannya RUU tentang Perubahan kedua atas UU Nomor

36/2004 tentang APBN 2005. Pengesahan RUU ini dilakukan dengan *voting terbuka* setelah adanya perbedaan pendapat diantara fraksi-fraksi yang ada di DPR. Perdebatan yang alot antara kubu yang pro dan kontra mewarnai suasana persidangan karena masing-masing fraksi mempunyai pandangan sendiri tentang kebijakan ini. Setiap fraksi mengklaim bahwa apa yang mereka kemukakan adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Fraksi PDIP secara tegas menolak disahkannya RUU ini dan menolak rencana kenaikan harga BBM. Fraksi PPP setuju RUU disahkan namun tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Suatu praktek *dagelan politik* oleh para politisi Senayan yang sering mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan kelompoknya.

Terbukti, disaat rakyat makin terpuruk tidak lama setelah kenaikan harga BBM, muncul kenyataan yang semakin menyakiti hati rakyat. DPR dan pemerintah telah menyetujui anggaran tambahan untuk DPR sebesar Rp. 86 milyar. Sebanyak Rp. 50 milyar dari dana itu dialokasikan untuk tambahan tunjangan anggota DPR. Besaran tambahan tunjangan tersebut adalah sebesar Rp. 10 juta per bulan untuk tiap anggota, sehingga *take home pay* anggota DPR meningkat signifikan dari Rp. 28 juta menjadi Rp. 38 juta. Alasan kenaikan ini karena tiap-tiap anggota membutuhkan biaya yang besar untuk mengunjungi konstituen mereka di daerah-daerah.

Menurut pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi, alasan tersebut dibuat-buat untuk mengelabui publik dan menunjukkan ketidaksensitifan anggota DPR atas kondisi bangsa (*Kompas*, 22 Oktober 2005). Belum lagi rencana pemerintah untuk menambah anggaran kepresidenan dari Rp. 700 juta menjadi Rp. 1,2 milyar. Inilah sebuah potret kebijakan publik yang dipraktekkan oleh para penguasa negeri ini.

B. Teori Tentang Kebijakan

Kebijakan publik pada hakekatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang diinginkan (Abidin 2004:10).

Kalau kita menyelami lebih jauh tentang kebijakan publik, maka akan muncul sebuah orientasi tunggal yaitu untuk kepentingan publik. Masyarakat sebagai *stakeholder* utama dalam sebuah kebijakan harus mendapatkan perhatian yang serius karena masyarakat yang paling merasakan dampak dari sebuah kebijakan. Oleh karena itu maka tiap-tiap kebijakan publik seyogyanya memiliki “semangat kepublikan” (Putra 2005: 34) yang mau tidak mau implikasinya harus menempatkan publik sebagai sasaran akhir dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Kenaikan harga BBM dalam sejarah kebijakan publik di Indonesia selalu menarik perhatian, terutama ketika banyak sekali media massa yang menopang bergulirnya isu yang berkaitan dengan naiknya harga BBM. Pemerintah menyadari betul bahwa media massa merupakan sarana efektif untuk mensosialisasikan kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Setiap saat di televisi kita

melihat iklan-iklan yang isinya memuat tentang manfaat dari kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah. Surat-surat kabar, baik nasional maupun lokal setiap harinya mengulas topik utama mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah sebuah implementasi kebijakan publik yang menurut pemerintah telah melalui pengkajian yang mendalam atas dampak yang akan ditimbulkan. Pemerintah tidak akan mungkin membuat sebuah Kebijakan kalau tidak disertai dengan tujuan yang baik (kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik). Tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu : diinginkan untuk dicapai, rasional dan realistis (*rational or realistic*), jelas (*clear*), dan berorientasi ke depan (*future oriented*) (Abidin 2005: 43).

Diinginkan untuk dicapai berarti bahwa dapat diterima oleh banyak pihak dan mudah untuk diimplementasikan. *Rasional dan realistis* merupakan pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif yang diperhitungkan atas dasar kriteria yang relevan dan masuk akal. *Jelas* tidak akan menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam masyarakat, polanya mudah dipahami hingga melahirkan sebuah pemahaman yang sama dalam melakukan langkah-langkah untuk mencapainya. *Berorientasi kedepan* ada visi atau sasaran yang menjadi acuan dalam jangka waktu tertentu, sehingga setelah masa tertentu dapat dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan Kebijakan tersebut. Intinya, penekanan kebijakan publik pada nilai-nilai demokrasi, karena hanya dengan demikian semua kelemahan dapat diatasi.

Kebijakan publik yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi hasilnya akan memiliki legitimasi yang kuat karena nilai demokrasi dalam semua kebijakan publik membuat semua elemen masyarakat akan merasa memiliki kebijakan itu. Kebijakan publik harus mampu mengatasi semua persoalan yang ada, jangan sampai justru malah menambah masalah di dalam masyarakat. Selain itu, kelebihan kebijakan publik yang demokratis akan mudah diimplementasikan. Sebab dukungan politik (*political support*) dari kebijakan yang diambil kuat. Dengan dukungan yang kuat, maka implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik karena sedikitnya hambatan mengingat sedikit sekali menerima penantangan.

Sisi lain dari sebuah kebijakan, dalam bidang yang sama suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakanlain. kebijakantentang kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kebijakan tentang pemberian Dana Kompensasi BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebuah contoh kaitan antara satu kebijakan dengan kebijakan lain yang diterapkan oleh pemerintah.

Jika dalam penerapannya, setelah dievaluasi ternyata kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat kelemahan-kelemahan, maka selanjutnya pemerintah akan berusaha agar tidak terulang kelemahan yang sama dalam rumusan kebijakan berikutnya, seperti kata orang bijak “jangan sampai jatuh dua kali pada

lubang yang sama karena itu adalah sebuah kebodohan”. Dalam hal ini sudah barang tentu hal-hal yang baik perlu dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan dan dikembangkan.

C. Implikasi Kenaikan Harga BBM

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM sudah pasti menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan ini telah memicu persoalan yang cukup kompleks. Reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat muncul ke permukaan. Sebab beban yang akan ditanggung oleh masyarakat bukan hanya beban ekonomis, tapi juga beban sosial dan psikologis.

Masyarakat yang sudah semakin resah akibat himpitan beban ekonomi serta maraknya kekerasan sosial yang terjadi di mana-mana, kini harus ditambah lagi dengan ancaman kenaikan biaya hidup yang semakin melambung tinggi. Kekerasan sebagai bagian problem psikologi bangsa ini nampaknya akan terus membayangi dan sudah pasti secara psikologi sosial menjadi masalah baru yang akan mengancam sendi-sendi kehidupan di Indonesia.

Fenomena gejala sosial tersebut semakin menambah deretan permasalahan sosial yang telah melanda negeri ini buah dari sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Untuk memberikan gambaran mengenai dampak pasca kenaikan harga BBM 1 Oktober lalu, berikut ini penulis akan memberikan ulasan dari implikasi yang ditimbulkan.

1. Dampak Sosial

Implikasi sosial atas sebuah kebijakandapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi sorotan utama, diantaranya stabilitas sosial, pendidikan dan kesehatan. Namun dalam tulisan ini penulis hanya akan mencoba menyorot dua sisi yaitu stabilitas sosial dan pendidikan.

1.a. Stabilitas Sosial

Kondisi bangsa yang sedang carut marut akibat dicabutnya subsidi BBM membawa implikasi pada *keresahan sosial* di tingkat masyarakat. Kebijakan ekonomi ini berimplikasi langsung pada melambungnya harga BBM dengan dampak ikutan (*multiplier effect*) tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah baru. Keresahan sosial akibat antrean panjang di SPBU-SPBU di hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi pemandangan “indah” sehari-hari akibat kelangkaan BBM. Namun ironisnya, penjual BBM eceran di pinggir-pinggir jalan semakin menjamur. Sekilas terlihat seakan-akan ada kerja sama antara pihak SPBU dengan para pengecer untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Setiap saat di SPBU-SPBU terlihat tulisan “*Bensin Habis*”, “*Solar Habis*”, tapi anehnya di sebelah SPBU banyak jerigen-jerigen yang berisi bensin, dari satu liter sampai lima liter. Akhirnya konsumenlah yang sangat dirugikan oleh kondisi ini. Di Samarinda,

pemandangan ini sangat terasa sekali mengusik nurani kita untuk bertanya, ada apa dengan negeri ini?

Di sisi lain, kasus penimbunan dan penyelundupan BBM oleh sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan di tengah krisis semakin marak. Untuk kasus penyelundupan BBM, Presiden Susilo Bambang Yodoyono memberikan pernyataan bahwa pencurian dan penyelundupan BBM sudah berlangsung selama 10 tahun dan kerugian negara rata-rata 8,8 trilyun per tahun (*Tempo*, 3-9 2005). Apa yang dikemukakan oleh presiden ini merupakan sebuah realita betapa negeri ini sudah menjadi “ladang” empuk bagi segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk “meraup rupiah” sebanyak-banyaknya. Supremasi hukum yang selalu didengung-dengungkan selama ini ternyata masih sebatas harapan yang belum mampu untuk direalisasikan. Contoh, kasus penyelundupan minyak mentah di *Single Buoy Mooring* (SBM) Lawe-Lawe Kalimantan Timur² yang hanya mampu menyeret 42 orang karyawan Pertamina level menengah dan bawah ke kursi pesakitan. Padahal disinyalir ada “orang besar” Pertamina menjadi dalang dibalik kasus ini yang belum mampu tersentuh oleh hukum. Masyarakat Indonesia telah sangat haus terhadap tertib hukum, khususnya terhadap kasus “penyelundupan yang dilindungi” (Stanley 2005: 91). Sekarang kasus ini seakan-akan hilang dari peredaran seiring dengan banyaknya isu yang mengemuka belakangan ini, seperti isu flu burung³.

Dampak lain yang muncul adalah maraknya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi mahasiswa dan LSM serta kaum buruh mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia menuntut pemerintah

² Aksi pencurian minyak di *Single Buoy Mooring* (SBM) Lawe-Lawe Kalimantan Timur terungkap akhir Agustus 2005, setelah MT. TIOMAN tertangkap operasi militer TNI AL di Perairan Berakit Kepulauan Riau. Dalang utama dari aksi ini adalah Sumardiyono

³ Isu seperti ini mengingatkan kita pada kasus kenaikan harga BBM Maret 2005 lalu, dimana kita tahu bahwa kasus ini bersamaan dengan bergulirnya *kasus Ambalat* (Perseteruan perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Perairan Kalimantan Timur). Ironisnya, di Malaysia tidak tampak gejala yang berarti atas perseteruan ini, media massa di sana tidak menjadikannya sebagai sesuatu hal yang istimewa. Berbeda dengan di Indonesia, isu ini ditanggapi dengan sangat berlebihan hingga gejala yang muncul memberikan indikasi seakan-akan akan terjadi perang antar negara serumpun ini. Apalagi media massa setiap harinya mengulas tentang bagaimana peta kekuatan (tentara, peralatan tempur) kedua negara yang sedang berseteru. Tapi, Ketika kondisi masyarakat mulai kondusif dengan tidak banyaknya gejala atas kenaikan harga BBM, pelan tapi pasti “Kasus Ambalat” sudah tidak lagi menjadi pembicaraan yang serius bahkan cenderung dilupakan.

Oleh karena itu banyak anggapan yang muncul dari masyarakat bahwa isu ini sengaja digulirkan untuk *mengalihkan perhatian masyarakat* atas kebijakan pemerintah yang tidak populis. Anggapan masyarakat ini belum tentu benar adanya, namun kenyataannya setiap kali pemerintah akan merealisasikan sebuah Kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti bersamaan dengan itu akan muncul isu baru yang seakan-akan menjadi hal yang luar biasa hingga menyita perhatian kita.

membatalkan kebijakan tersebut. Di Jakarta, Mahasiswa dan (buruh) berdemonstrasi dengan konsentrasi massa di Istana Negara, bundaran Hotel Indonesia dan gedung DPR. Di Makassar, mahasiswa melakukan aksi dengan membakar ban bekas serta menyandera mobil tangki yang kemudian dibawa ke Gedung DPRD Sulawesi Selatan sebagai bentuk ketidaksetujuan masyarakat akan kebijakan ini. Di wilayah-wilayah lain kondisinya tidak jauh berbeda, gejolak sosial yang kadang cenderung anarkis sering terjadi. Belum lagi sopir angkutan umum di kota-kota besar di Indonesia melakukan mogok besar-besaran hingga banyak menelantarkan pengguna angkutan umum. Kalaupun ada armada angkutan umum yang beroperasi, tarifnya mahal karena kenaikan tarif ditentukan secara sepihak oleh sang sopir. Sekali lagi, konsumenlah yang paling merasakan semuanya.

Bila diinventarisir, tuntutan dari semua aksi tersebut dapat disimpulkan menjadi empat poin. Pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Ketiga, segera me-reshuffle kabinet. Keempat, mendesak SBY-JK untuk memberantas korupsi (*Kaltim Post*, 29 September 2005). Apa yang dituntut oleh mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat ini adalah merupakan bukti bahwa rakyat juga wajib didengar karena itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar (Ramadhan 1995: 196).

Melihat realita ini, Presiden SBY justru “menantang” mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM untuk tetap menyuarakan aspirasi masyarakat melalui demonstrasi. Namun diharapkan agar aksi dilakukan secara damai dan tidak anarkis untuk menghindari adanya bentrokan antara massa pendemo dengan aparat (*Kaltim Post*, 29 September 2005).

Peran (militer dan polisi) sebagai aparat yang berada dibelakang pemerintah dalam merealisasikan sebuah kebijakan publik masih sangat dominan. Sudah menjadi kebiasaan di negeri ini bahwa setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan publik yang tidak populis pasti selalu dilindungi oleh aparat. Kondisi inilah yang menyebabkan setiap ada kebijakan pemerintah yang mendapat penentangan dari rakyat, maka sudah pasti aparat akan memposisikan diri menjadi “lawan” bagi masyarakat. Oleh karena itu tidak heran bila korban dipihak masyarakat (sipil) selalu saja berjatuh bila mencoba berontak atas kebijakan pemerintah yang nyata-nyata merugikan mereka. Padahal di era demokratisasi sekarang ini, kita harus mulai mengurangi peran militer (aparat). Sebab militerisme selama ini menjadi sumber konflik (Kartodirdjo 2003:94).

1.b. Pendidikan

Kebijakan pemerintah di sektor pendidikan masih jauh dari harapan. Kita sering mendengar pemerintah akan mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk pendidikan, namun kenyataannya, dana untuk pendidikan baru berkisar 13,6 trilyun rupiah atau sekitar 4% dari total APBN sebesar 300 trilyun rupiah (Prasetyo 2004:

18). Meski telah ditetapkan dalam GBHN, tapi pemerintah dengan berbagai asumsi belum mampu untuk merealisasikan alokasi dana 20 persen ini dan diperkirakan tahun 2009 dana ini baru bisa tercapai setelah melalui proses pencicilan. Keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor pendidikan sampai detik ini belum pernah terlihat, hingga tidak salah bila muncul anggapan bahwa pendidikan di negeri ini tidak pernah dikelola secara baik. Padahal disadari atau tidak salah satu parameter untuk melihat berkembangnya suatu negara adalah dilihat dari sisi pendidikan masyarakatnya.

Sebagai contoh, Negeri Jiran Malaysia sebagai salah satu negara yang tingkat kemajuannya terbilang pesat di ASEAN, dulu sekitar tahun 1960-an masyarakat malaysia banyak yang menuntut ilmu ke Indonesia, tapi sekarang justru berbalik, masyarakat Indonesia yang banyak menuntut ilmu ke Malaysia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan di Malaysia mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan perkembangan negaranya. Berbeda dengan di Indonesia, perkembangannya sangat lamban bahkan cenderung stagnan.

Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 lalu membuat sektor pendidikan kian terpuruk karena kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin kecil. Jika selama ini kita melihat sudah banyak generasi bangsa ini terpaksa harus putus sekolah karena tidak mampu, sekarang akan semakin banyak lagi yang ditarik dari sekolah oleh orang tuanya untuk membantu mencari tambahan penghasilan buat keluarga.

Kebijakan pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diyakini oleh berbagai pihak tidak akan mampu mengurangi angka *Drop Out* (DO) apalagi menghilangkannya. Biaya-biaya atau pungutan-pungutan yang selama ini dipungut oleh sekolah tidak akan mampu ditutupi oleh BOS. Ini dapat kita lihat dari besaran dana yang diterima adalah SD dan sederajat mendapat Rp. 19.500 per bulan, SLTP dan dererajat mendapat Rp. 27.000 per bulan. Untuk kondisi sekarang, jelas bantuan ini tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan sekolah karena tingginya angka pungutan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Keadaan ini menyebabkan pendidikan terasa semakin mahal dan hanya akan bisa dinikmati oleh kalangan yang mampu.

Tidak hanya anak bangsa yang mendapat imbas langsung dari kenaikan harga BBM, guru yang sering disebut sebagai *pahlawan tanpa tanda jasa* merupakan pilar utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa turut pula mengalami nasib yang menyedihkan. Dengan beban hidup yang semakin berat, banyak guru yang terpaksa harus mencari tambahan penghasilan di sela-sela kesibukannya sebagai pendidik, bahkan kadang-kadang sampai meninggalkan kewajibannya hanya untuk mendapatkan nafkah sampingan. Banyak guru yang harus menjadi tukang ojek, berdagang, bertani karena kenyataannya memang gaji mereka tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mungkinkah pendidikan di negeri ini akan maju dan meningkat kualitasnya jika para pendidik (guru) kurang

berkonsentrasi untuk melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah akibat kesibukan lain yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup alias menjaga agar asap dapur tetap mengepul? Bagaimana mungkin kesejahteraan bangsa bisa tercapai jika kualitas guru yang menjadi kunci *terabaikan*.

2. Dampak Ekonomi

Sudah dapat dipastikan bahwa dengan kenaikan harga BBM sekarang ini secara ekonomis sangat berimplikasi pada masyarakat kecil (miskin). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok (Soekanto 1990: 365). Lain halnya dengan konsep kemiskinan yang dipakai oleh UNDP (Program Pembangunan PBB), yang melihat kemiskinan dari sisi pendapatan. UNDP mendefinisikan *garis kemiskinan* sebagai orang yang bekerja dengan pendapatan dua dolar AS atau sekitar Rp. 17.000 per hari (Prasetyo 2004: 8).

Secara ekonomis rakyat akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebab harga barang-barang yang mereka butuhkan sehari-hari makin melambung tinggi bahkan kadang-kadang tidak terkendali. Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 lalu membuat masyarakat miskin semakin melarat, daya beli mereka semakin turun dan pada akhirnya rakyat semakin tidak tahu harus berbuat apa.

Kalau dilihat, 1 Oktober 2005 adalah momen yang tidak tepat untuk menaikkan harga BBM karena hampir berdekatan dengan hari-hari suci umat beragama, bahkan bersamaan dengan masuknya bulan suci Ramadhan. Sedangkan kita tahu bahwa biasanya dibulan ini kebutuhan masyarakat meningkat. Ini salah satu indikator yang membuktikan bahwa pemerintah tidak peka atas kondisi masyarakat.

Bukan hanya itu, di sisi lain industri-industri dan usaha kecil menengah (UKM) juga terkena embas dari kebijakan ekonomi pemerintah ini. Banyak industri dan UKM-UKM serta industri rumah tangga yang harus mengurangi karyawan dan produksi akibat tingginya biaya operasional. Bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan. Dengan tingginya biaya hidup yang harus ditanggung oleh karyawan akan berkorelasi dengan tingginya tuntutan kepada para pengusaha untuk menaikkan upah (gaji) mereka sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM. Industri tekstil dan keramik, khususnya di pulau Jawa yang menyerap banyak tenaga kerja justru terancam akan mem-PHK sebagian besar karyawannya akibat beban biaya rutin perusahaan yang semakin membengkak. Dalam waktu dekat diperkirakan jumlah pengangguran akan bertambah sekitar 1-2 juta orang. Meski pemerintah telah mempersiapkan sejumlah insentif bagi industri berbarengan dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 55 tahun 2005, namun itu tidak serta merta menyelesaikan masalah. Bahkan kadang janji di

atas kertas jauh meleset (*Tempo*, 3-9 Oktober 2005). Melihat ini semua pemerintah bisa berbuat apa untuk menggairahkan industri dan UKM di Indonesia?

3. Dampak Politik

Kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005 secara politis berdampak pada turunnya popularitas pemerintah. Ini adalah sebuah “ongkos” politik yang tidak murah. Kalau sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden September 2004 lalu, popularitas pasangan SBY-JK mampu mengalahkan empat rival mereka yang lain yaitu pasangan Wiranto-Salahuddin Wachid, Amin Rais-Siswono, Hamzah Haz-Agum Gumelar, dan Megawati- Hasyim Muzadi. Akhirnya memang pasangan SBY-JK terpilih menjadi Pemimpin negeri ini atas legitimasi dan kepercayaan rakyat. Dalam sejarah Indonesia, SBY-JK adalah Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu. Suatu prestasi luar biasa yang telah dicapai bangsa ini dilihat dari sisi perkembangan *demokrasi*.

Meskipun posisi SBY-JK sangat kuat karena mendapatkan legitimasi rakyat melalui pemilu langsung, bukan berarti bahwa rakyat akan menutup mata atas kebijakan pemerintah. Salah satu contoh yang dapat kita lihat dari kritikan masyarakat sekaitan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah ketika masyarakat menuntut “janji-janji” SBY-JK yang pernah dilontarkan dalam *debat publik* calon presiden dan wakil presiden di salah satu stasiun TV swasta. Pada saat itu SBY mengatakan “*kalau nanti saya dipercaya untuk memimpin negeri ini, saya tidak akan menyesuaikan harga BBM , utamanya yang menjadi konsumsi rakyat kecil, seperti minyak tanah dan solar*” tapi pernyataan itu hanya isapan jempol belaka, karena ternyata yang terjadi kemudian justru BBM yang dikonsumsi oleh rakyat kecil inilah yang kenaikannya di atas 100 persen. Inilah suatu contoh “retorika politik” yang sering kita dengar dan seakan menjadi kata-kata “hipnotis” bagi setiap *calon penguasa* negeri ini dalam memberi janji-janji kepada konstituennya.

Indikator lain yang menjadi bukti menurunnya popularitas SBY-JK adalah dengan banyaknya desakan dari masyarakat agar Presiden SBY *mereshuffle* kabinet, utamanya mengganti menteri-menteri di jajaran ekonomi karena dinilai gagal untuk mengatasi krisis ekonomi bangsa serta dianggap gagal membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Fenomena ini disikapi oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memberikan *warning* kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa. PKS “mengancam” akan menarik dukungannya dengan mencabut koalisi jika pemerintah terkesan lamban dalam menyikapi masalah yang muncul di masyarakat, dan menawarkan solusi *reshuffle* kabinet untuk mengatasi keadaan. Meski pada akhirnya melalui Sidang Majelis Syuro PKS tanggal 27 Nopember 2005 tetap mendukung pemerintah, namun PKS tetap akan memosisikan

diri sebagai *partner kritis konstruktif* (*Kompas*, 28 Nopember 2005) dengan harapan kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini masih belum berpihak kepada masyarakat luas dapat berganti dengan kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat luas. Karena itu pemerintah perlu memperlihatkan bukti nyata dalam bentuk kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

D. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kantor-kantor Pos di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 2005 disesaki oleh masyarakat. Ribuan orang berduyun-duyun datang untuk menebus sebuah kartu dengan uang sebesar Rp. 300.000 sebagai dana kompensasi BBM melalui program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). *Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)* adalah kebijakan pemerintah yang mengikuti kebijakan kenaikan harga BBM. Program ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin dengan harapan akan menjadi “obat penenang” atas gejolak yang muncul atas kenaikan harga BBM. Bank Dunia menilai eksperimen subsidi bantuan langsung tunai di Indonesia tidak main-main karena program BLT ini terbesar di dunia yang pernah ada, karena menyangkut lebih dari 60 juta jiwa.

Menurut Direktur Utama Institute for Development Economic and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan, “pemerintah memberikan BLT agar masyarakat miskin tidak protes. Program belas kasihan ini tergolong *unconditional cash transfer*, termasuk tidak mendidik masyarakat untuk giat bekerja keras. Program ini membodohi masyarakat miskin dan membuat mereka malas” (*Kompas*, 22 Oktober 2005).

Apa yang disinyalir oleh M. Fadhil Hasan pada kenyataannya memang terbukti. Program pemberian BLT yang bertujuan untuk keperluan produktif demi peningkatan kesejahteraan, malah oleh sebagian besar masyarakat dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya *mubazir*, misalnya untuk membeli minuman, membayar utang, bahkan tidak sedikit yang mempergunakan BLT untuk membeli togel. Ini adalah konsekuensi dari tidak adanya batasan yang jelas dan larangan tentang bagaimana pemanfaatan dana BLT, ditambah lagi tidak ada kontrol sama sekali. Jadi, masyarakat terkesan menerima bantuan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat tanpa mengetahui substansi dari bantuan tersebut.

Indikasi negatif lain yang muncul di tengah masyarakat adalah sebelum pemberian BLT, masyarakat mempunyai semangat kerja walau sekedar hanya untuk mendapatkan uang pembeli rokok, tapi setelah program ini dijalankan oleh pemerintah, sebagian masyarakat cenderung apatis sambil menunggu pembagian BLT tahap berikutnya, karena menurut mereka meskipun tidak giat bekerja tetap akan mendapatkan uang untuk membeli kebutuhan hidup. Semestinya pemerintah jangan membiasakan rakyatnya untuk mendapatkan uang tanpa berusaha. Menurut penulis, akan lebih baik bila *masyarakat diberi kail untuk memancing ikan dari pada langsung memberikan ikan tanpa diajarkan cara memancing*.

Kalau BLT ditargetkan untuk mensejahterakan masyarakat, jelas besaran dana yang diberikan tidak akan mampu memutus rantai kemiskinan. Bahkan berdasarkan hasil jajak pendapat “Kompas” tanggal 19-20 Oktober 2005, 83,9 persen responden menilai jumlah dana BLT sebesar Rp. 100.000 per keluarga miskin per bulan sangat tidak memadai dan tak masuk akal dengan kondisi riil sekarang.

Dilihat dari pencapaian sasaran pembagian BLT tahap I yang dimulai tanggal 1 Oktober 2005, ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak kendala teknis dan penyimpangan yang terjadi, misalnya pembagian dana BLT yang tidak tepat sasaran, tidak akuratnya pencatatan oleh BPS sebagai mitra pemerintah dalam hal penyiapan data warga miskin, adanya penyimpangan oleh “oknum” aparat desa maupun kelurahan yang menggelapkan dana BLT dan kendala-kendala lain.

Pencatatan yang dilakukan oleh pihak BPS banyak mengalami hambatan fisik dan psikologis, misalnya di suatu daerah tiba-tiba penduduk miskin secara signifikan mengalami peningkatan karena adanya sebagian masyarakat yang dengan sukarela “memiskinkan diri” hanya untuk mendapatkan kartu BLT. Kasus seperti ini terjadi di Makassar, ada seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut-ikutan antre untuk mencairkan dana BLT di kantor Pos. Padahal di rumahnya sudah punya motor, televisi dan fasilitas lainnya. Kondisi ini bisa terjadi karena petugas pencatat dari BPS mempunyai hubungan keluarga dengan si PNS. Belum lagi di daerah lain, pencatat dari BPS mendapat intimidasi dari seorang warga agar petugas memasukkan dia sebagai warga miskin agar bisa mendapatkan kartu BLT. Akhirnya sudah dapat dipastikan bahwa banyak diantara keluarga yang benar-benar miskin tidak terdata oleh pencatat dan otomatis tidak akan mendapatkan dana BLT. Sebaliknya justru banyak keluarga mampu yang terdata sebagai keluarga miskin dan ikut menikmati dana BLT. Inilah salah satu contoh penyaluran dana BLT yang tidak tepat sasaran.

Akibat ketidakakuratan data oleh BPS, telah memicu tindakan yang anarkis dari warga. Di Tangerang dan Lombok misalnya, ratusan warga merusak kantor desa dan mencari kepala desa dengan senjata tajam karena merasa berhak untuk menerima dana BLT, tetapi terdata. Bukan hanya di Tangerang dan Lombok saja, kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan sudah pasti memicu terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Selain itu, penyelewengan dana BLT yang dilakukan oleh “oknum” aparat desa dan kelurahan juga menambah kekisruhan penyaluran dana. Ada beberapa oknum aparat yang tanpa merasa berdosa sedikitpun berusaha memanipulasi data untuk kepentingan pribadi. Ada juga aparat yang melakukan pemotongan dana BLT sebesar Rp. 25.000 per keluarga dengan alasan biaya administrasi pencairan dana. Fenomena ini menunjukkan betapa bobroknnya moral sebagian aparat yang sejatinya sebagai pelayan bagi masyarakat, tapi justru malah menjadi “pengisap darah” masyarakat miskin.

Belum lagi, proses pencairan dana BLT yang telah banyak meminta korban pada saat berdesak-desakan antre di depan loket kantor pos. Banyak manula yang

harus digotong untuk mendapatkan pertolongan medis akibat pingsan di tengah-tengah kerumunan massa yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Yang lebih *tragis* lagi terjadi di Kabupaten Banjarnegara, seorang warga tewas akibat truk yang ditumpangi rombongan pengambil BLT terguling saat dalam perjalanan ke kantor pos. Menurut data yang ada, korban yang tewas dalam proses pencairan dana BLT di seluruh Indonesia sekitar lima orang.

Terlepas dari semua dampak di atas, sebagian kecil masyarakat menganggap bahwa program pemberian dana BLT bagi rakyat miskin sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Bahkan mereka berharap agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan agar kesulitan ekonomi akibat himpitan biaya hidup yang semakin melambung tinggi dapat sedikit tertutupi. Mereka inilah yang merasa terbantu oleh dana BLT yang disalurkan oleh pemerintah.

Meskipun ada perbedaan pandangan dalam masyarakat tentang program pemberian dana BLT, menurut hemat penulis, program ini harus tetap berjalan dan diteruskan sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Apalagi tahap I sudah dilaksanakan. Apa yang menjadi persoalan yang diakibatkan oleh kelemahan dan kekurangan pada tahap ini, seharusnya menjadi masukan dan *starting point* bagi pemerintah untuk membenahi pelaksanaan pemberian dana BLT tahap berikutnya, kemudian melakukan upaya-upaya *preventif* untuk meminimalisir dampak negatif yang akan muncul.

Untuk ke depan, dalam pemberian dana BLT bagi rakyat miskin, pemerintah harus memperhatikan lima hal. Pertama, merumuskan kembali maksud dan tujuan program ini. Kedua, perlu perombakan organisasi baru yang tangguh. Bisa dibuat semacam Badan Pelaksana yang tugasnya melaksanakan program ini secara utuh. Ketiga, harus ada lembaga lain yang bertugas memonitor dan mengevaluasi. Keempat, jika memang program ini akan dijadikan program kesejahteraan, harus ada dana tetap yang tidak dapat diganggu gugat dari APBN yang dialokasikan tiap tahunnya. Kelima, pemerintah harus menyiapkan *exit strategy* agar tidak menciptakan ketergantungan (*Kompas*, 22 Oktober 2005).

Sebagai kontribusi diakhir tulisan ini, penulis mendukung apa yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Komisi XI DPR, Drajad yang memberikan solusi agar untuk teknis pendataan warga, pemerintah perlu mengembangkan *Social Security System* yang berbasis *single identification number* (nomor identifikasi tunggal). Dengan adanya sistem ini diharapkan akan diperoleh data yang akurat untuk memudahkan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian dana BLT untuk tahap-tahap berikutnya.

Dari pemaparan di atas, akhirnya penulis mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintahan SBY-JK untuk melaksanakan semua *program pengentasan kemiskinan* yang telah

direncanakan. Namun sudah pasti tidak mengurangi sikap kritis kita atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat luas. Sebagai “mitra” pemerintah, sikap kritis sangat diperlukan untuk menjaga agar pemerintah tetap pada jalur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan roda pembangunan bangsa yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan.

E. Kesimpulan

Kebijakan pemerintahan SBY-JK menaikkan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005 merupakan implementasi kebijakan publik di bidang ekonomi. Pemerintah dan DPR sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan ini optimis permasalahan ekonomi bangsa yang belum juga pulih sejak krisis ekonomi tahun 1998 akan mampu teratasi dengan. Meskipun pemerintah telah melakukan pengkajian yang mendalam sebelum kebijakan ini diterapkan, namun realitas di masyarakat timbul dampak yang cukup meresahkan. Dampak yang paling nyata dapat dilihat adalah munculnya dampak ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk mengatasi dampak yang ada, pemerintah membuat sebuah kebijakan baru sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), tapi kebijakan ini pun tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada. Malah menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Kritikan yang muncul mengatakan bahwa *BLT adalah sebuah program yang tidak terencana dengan baik dan terkesan hanya untuk meredam gejala sesaat*. Pernyataan ini sah-sah saja dilontarkan oleh beberapa kalangan melihat substansi dari pemberian BLT ternyata tidak tepat sasaran mengingat banyaknya kendala-kendala teknis yang dijumpai di lapangan oleh para pelaksana pendistribusian dana BLT.

Daftar Pustaka

- Kartodirdjo, Sartono. 2000. “Militerisme Selalu Jadi Sumber Konflik.” Dalam Tono, Suwidi. *Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta*. Jakarta: Vision 03.
- Prasetyo, Eko. 2005. *Orang Miskin Dilarang Sekolah*. Yogyakarta: Resist Book.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak Untuk Publik*. Yogyakarta: Resist Book.
- Ramadhan, K.H. 1995. *Pers Bertanya Bang Ali Menjawab*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Stanley. 2005. *Soe Hok Gie: Zaman Peralihan*. Jakarta: GagasMedia.
- Tono, Suwidi. 2000. *Mampukah Indonesia Bangkit?* Jakarta: Vision 03
- Zainal Abidin, Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.

Media Massa

- Kompas*, 22 Oktober 2005.
- Kompas*, 28 Nopember 2005.

Kebijakan Pemerintah SBY-JK Tentang Kenaikan Harga BBM (M. Hairul Saleh)

Kaltim Post, 29 Oktober 2005.

Tempo, 3-9 Oktober 2005.